



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN  
HILIR SEBERANG KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

**YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA**

**11375106351**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

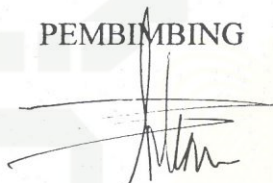
**2019**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA :** YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA  
**NIM :** 11375106351  
**JURUSAN :** ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS :** EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL :** ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN  
 KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN  
 SINGINGI

**DISETUJUI OLEH  
PEMBIMBING**



**Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
NIP. 130 712 075

**MENGETAHUI**

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara

**Dr. Dr. H. MUH. SAID HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

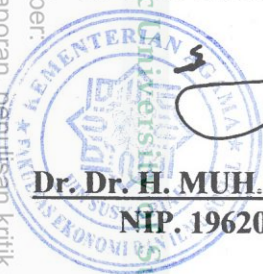
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA  
**NIM** : 11375106351  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

### PANITIA PENGUJI

KETUA

**Dr. KAMARUDDIN, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19790101 200710 1 003**

MENGETAHUI

PENGUJI I

**IKHWANI RATNA, SE, M.Si**

**NIP. 19830827 201101 2 014**

PENGUJI II

**VIRNA MUSELIZA, SE, M.Si**

**NIP. 130 712 073**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

... Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat ... (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Kunci ilmu adalah bertanya dengan baik dan serius mendengar

Kunci kemenangan adalah sabar

Kunci penambahan nikmat adalah Syukur

Ya Allah ya Rabbi... puji syukur kepada-Mu yang selalu memberikan kesabaran dan ketabahan kepadaku dalam mengarungi liku hidup ini. Ya Rabb... Atas izin dan ridho-Mu jua aku dapat menyelesaikan amanah ini, bantu aku ya Allah agar ilmu yang diperoleh bisa kumfaatkan di jalan yang Engkau ridhoi.... Amin.

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk ayahanda Khaidir dan ibunda Eni Darlis tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayangnnya kepadaku sedari kecil. Ayah.... Bunda... Kesabaran dan keikhlasanmu dalam mendidik anak-anakmu merupakan peneguh langkah ini dalam menggapai cita-cita ananda. Tanpa do'a dan restu ayah bunda tiada mungkin ananda kan tegar mengarungi liku perjuangan ini... semoga Allah meridhoi semua pegorbanan ayah dan bunda dalam mendidik dan membimbing ananda untuk menjadi yang terbaik,

Kupersembahkan juga karya ini untuk adikku tercinta Vemri terima kasih atas dukungan dan do'anya. Dan juga untuk adik-adikku tersayang "Aldo dan Altarizqi" yang selalu menghadirkan keceriaan dalam hidupku. Do'a ku, semoga adik-adikku tegar dalam menggapai cita-cita.

Terimakasih buat teman-temanku seperjuangan (Administrasi Negara K 13) yang telah memberi dukungan dan berbagi pengalaman semasa dibangku kuliah dan sahabat-sahabatku Wimbi Pebudhanda, S.Psi dan Desjebrialdi, S.Si yang telah memberi semangat dan dorongan diluar masa perkuliahan, semoga teman-teman yang belum agar dapat menyusul mendapatkan gelar segera ya...Amin....

Pekanbaru, September 2019  
Penulis

Yoga Andrika Tama Candra, S.Sos





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
DESA (APBD) di DESA PULAU BERALO  
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**OLEH :**

**YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA**

*Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa yang terdapat di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo sudah terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka Informan informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu 1 orang terdiri dari Kepala Desa, 6 orang dari BPD, 2 orang perangkat desa. 1 orang dari LKMD dan 2 orang lainnya dari tokoh masyarakat. Teknik dalam pengambilan data yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu bertujuan, penulis yang menentukan informan penelitian sendiri. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata yang dituangkan dalam bentuk tabel kemudian dijabarkan dalam bentuk kata-kata secara rinci agar lebih mudah di fahami.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Pulau Beralo sudah digunakan dengan cukup baik, walaupun belum maksimal sepenuhnya. Dalam segi pembangunan masih terdapat pembangunan yang belum berjalan sesuai harapan, contohnya jalan dipedesaan yang cepat rusak. Kemudian pelaksanaan pemerintahan desa juga lumayan meski banyak yang harus dibenahi, terus mengenai pembinaan kemasyarakatan masih kurang banyak kegiatan desa yang non aktif salah satu contoh : BUMdes. Dan mengenai secara keseluruhan memang fakta dilapangan masih jauh dari harapan masyarakat bersama, harus lebih bekerjasama untuk kedepannya dalam membangun desa.*

*Kata kunci ; Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasullullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul” ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do’a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Khaidir dan Ibunda Eni Darlis, Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

do'a dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan tersebar penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
4. Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
5. Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp Selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kepada seluruh Perangkat Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Kepada Pak Etek dan Mak Etek yang tiada henti memberi nasehat serta do'a dan dukungannya.
10. Kepada Nova Lidayati dan Tasha Amelia yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 Sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga Desjebrialdi, S.Si, Mohd Wimbi Februdhanda, S.Psi, Ihsan Tri Gunawan, S.Sos, dan Trendy Hasmiral Prasanja, S.Sos yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi.

1 Sahabat - sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2013 terkhusus Lokal K dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu - persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

**Yoga Andrika Tama Candra**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Otonomi desa .....	11
2.2 Defenisi Desa .....	13
2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	15
2.4 Kewenangan Desa .....	19
2.5 Kepemimpinan Desa .....	19
2.6 Pembangunan Desa .....	21
2.7 Pemberdayaan Masyarakat .....	21
2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) .....	23
2.9 Pengelolaan Keuangan Desa .....	25
2.10 Pandangan Islam Tentang Pembangunan .....	27
2.11 Penelitian Terdahulu .....	28
2.12 Defenisi Konsep .....	29
2.13 Konsep Operasional .....	30
2.14 Kerangka Pemikiran .....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Sejarah Desa Pulau Beralo .....	37
4.2 Kondisi Geografis .....	38
4.3 Demografi Desa .....	38
4.3.1 Jumlah Penduduk .....	39
4.3.2 Agama Penduduk .....	40
4.3.3 Suku Penduduk.....	41
4.3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	42
4.3.5 Mata Pencarian Penduduk .....	43
4.4 Kondisi Sosial .....	44
4.4.1 Sarana Pendidikan .....	45
4.4.2 Sarana Kesehatan .....	45
4.4.3 Sarana Ibadah .....	47
4.5 Kondisi Pemerintahan Desa .....	47
4.5.1 Lembaga Pemerintahan Desa .....	48
4.5.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa .....	49
4.6 Visi dan Misi Desa Pulau Beralo .....	50
4.6.1 Visi .....	50
4.6.2 Misi.....	51
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Pengelolaan APBD .....	52
5.1.1 Pendapatan Desa .....	56





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.1.1	Hasil Usaha Desa .....	58
5.1.1.2	Hasil Aset/Kekayaan Desa .....	61
5.1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat .....	64
5.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Desa.....	66
5.1.1.5	Transfer .....	69
5.1.1.6	Dana Desa .....	70
5.1.1.7	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah .....	72
5.1.2	Belanja Desa.....	73
5.1.3	Pembiayaan Desa .....	83
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>88</b>
6.1	Kesimpulan .....	88
6.2	Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 APBD Tahun 2017 .....	6
Tabel 1.2 Daftar Penggunaan APBD Tahun 2017 .....	7
Tabel 2.1 Konsep Operasional .....	30
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Agama .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Suku .....	41
Tabel 4.4 Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	42
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Jenis Mata Pencanharian .....	44
Tabel 4.6 Distribusi Berdasarkan Sarana Pendidikan .....	45
Tabel 4.7 Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan.....	46
Tabel 4.8 Distribusi Sarana Ibadah .....	47
Tabel 4.9 Distribusi Berdasarkan Lembaga Pemerintahan Desa .....	48
Tabel 4.10 Distribusi Lembaga Kemasyarakatan.....	50
Tabel 5.1 Tanggapan Informan Penelitian tentang Pengelolaan APBD Pulau Beralo.....	53
Tabel 5.2 Tanggapan Informan Penelitian tentang Pelaksanaan Agenda Rapat di Desa Pulau Beralo .....	55
Tabel 5.3 Pendapatan Desa Pulau Beralo Tahun 2017.....	56
Tabel 5.4 Tanggapan Informan tentang Pendapatan Desa Pulau Beralo .....	58
Tabel 5.5 Belanja Desa Pulau Beralo Tahun 2017 .....	74
Tabel 5.6 Tanggapan Informan tentang Penggunaan APBD untuk Belanja Desa Pulau Beralo .....	83
Tabel 5.7 Pembiayaan Desa Pulau Beralo Tahun 2017 .....	83
Tabel 5.8 Tanggapan Informan Mengenai Pembiayaan di Desa Pulau Beralo .....	86

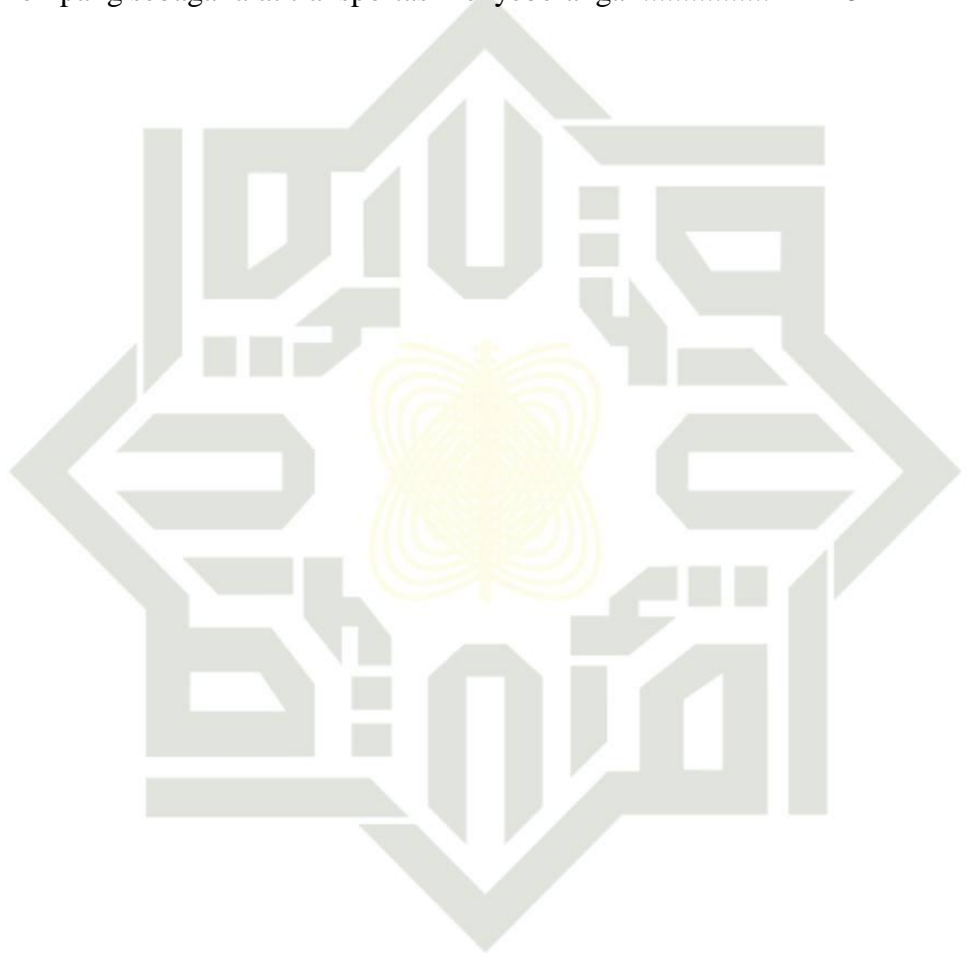


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	
Desa Pulau Beralo .....	31
Gambar 5.1 Kompang sebagai alat transportasi Penyeberangan.....	64



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1 Latar Belakang Masalah

Daerah kabupaten terdiri dari beberapa desa yang mengatur perekonomiannya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatakan bahwa desa adalah Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti penggunaan anggaran desa (Iqsan : 2016). Menurut Virgie, dkk (2013 : 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPD).

Masing-masing desa memiliki keuangan desanya sendiri. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka hukum keuangan desa yaitu, semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian keuangan desa tersebut akan dikelola. Pengelola keuangan itu sendiri merupakan semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka memajukan desa dan masyarakat disekitarnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan bahwa tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan : 2012 :328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakasa (Sumpeno : 2011 :25).

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuklah dalam membangun pembangunan fisik maupun non fisik desa.

Berkaitan dengan masalah keuangan desa, maka secara otomatis setiap desa akan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunannya masing-masing. Karena memang sudah seharusnya demikian, setiap desa diharuskan berkembang bersama masyarakatnya sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5558). Dan juga Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan Desa merupakan uang Negara yang harus dikelola berdasar pada hukum atau aturan yang berlaku. Uang Negara itu sendiri diperuntukkan untuk membangun desa yang lebih maju dalam bidang pembangunan fisik seperti:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan, gedung pendidikan dan sebagainya. Dana Desa sudah ada ketentuannya masing-masing diperuntukkan kepada setiap desa agar setiap desa bekerjasama membangun desanya agar tidak ketinggalan dibandingkan desa lain. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan berasal dari pemerintahan pusat yang dipercayakan oleh kepada setiap pemimpin daerahnya masing-masing, dibagi rata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Daerah di pimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya masing-masing. Kepala Daerah ditingkat Propinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan ditingkat Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati dan untuk Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah itu sendiri memiliki tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing. Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah (SEKDA), Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Sumber dari keuangan desa itu sendiri berasal dari alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Begitu juga yang terdapat di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Semua desa memiliki anggaran pendapatan desa (APBD) masing-masing. Maksud dan tujuan utama diberikannya APBD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Beralo tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Melalui APBD, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 5 tahun atau disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDes tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 5 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam program prioritas. Selanjutnya program prioritas selama 5 tahun tersebut akan di break down lagi menjadi program prioritas tahunan. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, antara lain:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 ada tiga tujuan pembangunan desa, yaitu: meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan. Ketiga tujuan pembangunan menjadi perspektif dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diatas, maka tujuan pembangunan desa itu sendiri akan diwujudkan melalui lima prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana desa
3. Pembangunan prasarana desa
4. Pengembangan ekonomi lokal
5. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah APBD dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 APBD Tahun 2017**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Dana
1.	2013	Rp. 150.500.000,-
2.	2014	Rp. 560.000.000,-
3.	2015	Rp. 651.300.000,-
4.	2016	Rp. 731.703.000,-
5.	2017	Rp. 1,159,051,000,-

**Sumber : Kantor Desa Pulau Beralo tahun 2017**

Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang besar, yakni berdasarkan catatan Pemerintah Desa, APBD yang diterima berjumlah Rp.1,159,051,000,- namun dana yang telah diterima tersebut belum bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini dipertegas lagi oleh fakta dilapangan bahwa berdasarkan pengamatan awal serta wawancara awal yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang sedang terjadi didalam lingkungan masyarakat Desa Pulau Beralo tersebut. Permasalahan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pengelolaan APBD di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang lebih diperuntukkan kepada belanja rutin dan operasional Kepala Desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang diakui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di Desa Pulau Beralo.
2. Biaya Pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya pencairan APBD.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Belanja data penggunaan APBD pada belanja Operasional Kantor dan Organisasi Desa pada Desa Pulau Beralo melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam pedoman penggunaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 Daftar Penggunaan APBD Tahun 2017**

No.	Belanja Desa	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.253.077.200,00
2.	Bidang Pembangunan	Rp.537.389.725,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.103.164.450,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.224.853.750,00
5.	Pengeluaran Tidak Terduga	Rp.10.000.000,00
	Jumlah	Rp.1.128.485.125,00

**Sumber : Olahan Data, tahun 2018**

Di telaah dari tabel diatas bahwa mengenai APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2014. Dan dijabarkan dalam peraturan Bupati Kuantan Singini Nomor 32 tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015.

Desa manapun pasti memiliki anggaran masing-masing. Jumlah anggaran tersebut harus tahu juga kemana dibelanjakan untuk kepentingan desa itu juga, demi kemajuan desa baik dalam bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan maupun kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa bersama bawahannya harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa. Memajukan desa memang merupakan tugas yang berat, namun sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai penggerak roda pemerintahan.

Anggaran dana desa yang ada seharusnya dipergunakan dengan baik. Sebab, dana desa yang diterima sejatinya untuk membangun desa bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oangnya. Jadi, dalam hal ini di Desa Pulau Beralo cukup banyak ketertinggalan, khususnya dalam bidang pembangunan fisik di desa.

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti: pembangunan jalan, kantor desa, dan sebagainya. Namun, belum terealisasi sampai sekarang. Masih banyak harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pembangunan itu sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi “*.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo sudah terealisasikan dengan baik sebagaimana mestinya?
2. Bagaimana kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Apaun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo sudah terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Apapun manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Akademik, yaitu untuk menambah Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Administrasi pada khususnya dalam bidang Administrasi Negara.
2. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam bab sebagai berikut berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Berisikan beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, seperti otonomi daerah, otonomi Desa, konsep pemerintahan desa, konsep pembangunan, konsep APBD, pandangan Islam tentang pembangunan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, definisi konsep, konsep operasional.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang uraian secara umum hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.



## 1 Otonomi Desa

# BAB II TELAAH PUSTAKA

Otonomi menurut H.A.W Widjaja (2011 : 21) adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencaoi efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2003, 165).

Kemudian, dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka

ekonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menyatakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2 Definisi Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa menurut Widjaja H.A.W (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintahan Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi desa yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

### 2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan
- d. penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- e. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat(4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 4 Kewenangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 Tahun 2015 Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan desa terdiri dari :

### 1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Kewenangan ini didefenisikan sebagai hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

### 2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## 2.5 Kepemimpinan Desa

Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desa dibutuhkan para pemimpin yang dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, kualitas kehidupan kerja, dan peran kritis dalam membantu kelompok, kelembagaan dan organisasi desa atau masyarakat untuk mencapai tujuan serta visi dan misi desa yang telah ditetapkan.

Secara umum, tipe kepemimpinan Kepala Desa yang dapat dibagi menjadi tiga. Masing-masing akan diuraikan dibawah ini, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. **Kepemimpinan Regresif**

Kepemimpinan regresif yaitu kepemimpinan yang berwatak otokratis. Otokrasi berarti pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, baik terhadap perubahan tata kelola baru seperti Musyawarah Desa atau usaha ekonomi bersama Desa. Desa yang bersifat parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta desa-desa korporalitas (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

### 2. **Kepemimpinan Konservatif-Involutif**

Merupakan model kepemimpinan yang ditandai oleh hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan tipe ini hanya menjalankan arahan yang diatas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.

### 3. **Kepemimpinan Inovatif-Progresif**

Merupakan tipe kepemimpinan yang ditandai oleh adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti pada perubahan seperti tipe sebelumnya, justru malah membuka seluas-luasnya ruang partisipasi yang demikian kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang

lebih besar dari masyarakatnya. Tipe kepemimpinan ini sangat dibutuhkan sekali bagi setiap desa agar mengalami perubahan yang signifikan.

## 6 Pembangunan Desa

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal Desa berskala lokal bisa dilaksanakan sendiri oleh Desa yaitu secara swakekola. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang ada agar berjalan dengan prosedur yang resmi guna mensejahterakan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

### 2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup baik untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.s

Prinsip dasar dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno : 2015) ada lima macam yaitu :

#### 1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*)

Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### 2. Partisipasi (*Participation*)

Dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

#### 3. Konsep Keberlanjutan

Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

#### 4. Keterpaduan

Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat loka, regional dan nasional.

#### 5. Keuntungan Sosial dan Ekonomi

Merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

APBD dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim : 2008 : 20).

Sedangkan menurut Mahsun (2015 : 81) menjelaskan bahwa APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman serta berbagai perubahan yang terjadi, APBD sekarang ini didasari pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (Halim 2008 : 23).

Mahsun (2015 : 83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari:

#### 1. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Abdul Halim (2008 : 96) menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

#### 2. Belanja

Belanja terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Abdul Halim (2008 : 100), belanja dapat diklasifikasikan secara ekonomi yaitu :

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas plporsn lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

#### 3. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008 : 103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pebcairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 2.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri no 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahun perencanaan sekretaris desa menyusun Rancangan Pembangunan Desa tentang APBD berdasarkan RKPDes tahun berkenan dan menyampaikan rancaangan tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah disepakati bersama Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat

sempat. Pada tahun pelaksanaan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa, pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan desa. Kemudian pada penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya pada tahap pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan reasalisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota berupa: laporan reasalisasi semester pertama dan semester akhir tahun. Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan melampirkan: 1) format Laporan Reasalisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berkenaan. 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. 3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dalam Pemendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10 Pandangan Islam tentang Pembangunan

Konsep pembangunan dalam Islam tentang Pemerintahan Desa adalah untuk mencapai Kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat, adapun pembangunan dalam islam dijalankan melalui dua tahapan:

- a. Tahap pembangunan kerohanian
- b. Tahap pembangunan fisik

Akal dan jiwa manusia itu perlu dibangun lebih dahulu sebelum pembangunan fisik dilakukan, ini merupakan bagian melahirkan insan yang mempunyai pemikiran bersih, suci dan jauh dari sifat-sifat tidak terpuji. Terutama pendekatan dalam islam adalah atas kejiwaan, moral serta etika-etika pembangunan.

Islam memberikan ruang kepada manusia guna mencapai kesejahteraan dan kekayaan dunia. Usaha mengejar kemewahan dunia tidak bisa dipisahkan dari aspek akhlak yang bertindak sebagai pengawas, demi untuk menghadapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat *Al-A'araf ayat :74*

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الأعراف: ٤٤)

Artinya :

“Dan ingatlah oleh mu di waktu tuhan menjadikankamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikantempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu meraja lela dimuka bumi dan membuat kerusakan”.*

Dari keterangan ayat diatas menerangkan bahwa Allah Subhanahhu Wata’alla memberikan fasilitas kepada manusia berupa bumi beserta isinya agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Setelah bumi ini diciptakan, Sang Maha Kuasa memandang bahwa bumi itu perlu didiami, diurus, diolah untuk itu Allah menciptakan manusia yang diserahi tugas dan jabatan yang disebut sebagai khalifah atau pemimpin. Kemampuan bertugas merupakan suatu anugrah yang mana pelaksanaannya adalah tanggung jawab manusia bernama khalifah.

Untuk itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lengkap dan utuh dengan sarana yang lengkap.

### 2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah skripsi dari Muhammad Taufik (2010) dengan judul “*Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Klekean Batolinggo Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015*”. Dalam penelitian ini membahas permasalahan yaitu : bagaimanakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan landasan teorinya adalah : teori pemerintah, kebijakan, teori kewenangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budi Putri Utami (2013) dengan judul “*Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kelurahan Gondangsari Juwiring Katen*”. Permasalahannya yaitu : bagaimanakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan landasan teorinya : keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan. Tipe penelitian yaitu kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif. Teknik pengumpulan data : teknik observasi wawancara dan dokumentasi.

### 2.12 Defenisi Konsep

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian, maka penulis menjelaskan batasan istilah agar penelitian nantinya lebih mudah di fahami. Maka dari itulah penulis menjelaskan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDa) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
2. Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
3. Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (**Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**).

4. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya (**Permendagri No 113 Tahun 2014**).

### 2.13 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan sesuatu hal tertentu agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
Pengelolaan APBD di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singngi	1.Pendapatan	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset
	2.Belanja	a.Belanja Terduga b.Belanja Tak Terduga
	3.Pembiayaan	a.Pembangunan Fisik dan non fisik b.Bantuan sosial c.Pemberdayaan Masyarakat

*Sumber : Data diolah,2017*

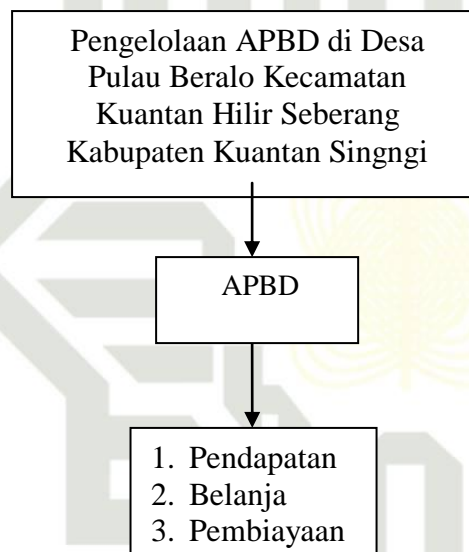


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai penelitian yang akan kita lakukan kedepannya, bisa juga penggambaran proses dari alur penelitian kita nantinya. Penelitian yang dilakukan berikutnya berpedoman pada kerangka pemikiran yang dibuat sebelumnya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Beralo**



*Sumber : Dala Olahan Lapangan, 2017*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini juga akan dilakukan sekitar bulan Oktober sampai Desember 2018.

## 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini berformat deskriptif. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian, mengangkat permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tersebut (Burhan, Bungin :2011 :44).

Jenis penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan memerlukan berbagai sumber data untuk membantu pengumpulan data dilapangan, adapun sumber data yang dimaksud sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

## 3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	BPD	6 Orang
3.	LKMD	1 Orang
4.	Perangkat Desa	2 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	2 Orang
<b>Total</b>		<b>12 Orang</b>

**Sumber Data : Kantor Desa Pulau Beralo Tahun 2017**

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

#### 2. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan tulisan ilmiah.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara deskriptif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata yang dituangkan dalam bentuk tabel kemudian dijabarkan dalam bentuk kata-kata secara rinci biar lebih mudah di fahami.

#### 1. Data Reduksion ( *Reduksi Data* )

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

**2. Data Display (*Penyajian Data*)**

Setelah data direduksi maka langkah berikutnya mendisplaykan data. Display data dalam penelitian Kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (Jejaring Kerja).

**3. Conclusion Drawing/Verification (*Penarikan Kesimpulan*)**

Verifikasi atau penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Sejarah Desa Pulau Beralo, kondisi geografis, monografi desa yang berisikan seperti: jumlah penduduk, agama penduduk, mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan penduduk, serta sarana dan prasarana, adat istiadat serta susunan para pemimpin adat yang terdapat di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4.1. Sejarah Desa Pulau Beralo

Berdasarkan dari cerita mulut ke mulut bahwa Desa Pulau Beralo berdiri berdasarkan sejarah penjajahan dimasa lalu. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat bahwa pada zaman dahulu, ketika masa penjajahan datang ke Desa Pulau Beralo banyak korban yang berjatuhan dalam peperangan melawan penjajahan. Mayat-mayat tersebut banyak yang nyangkut disekitaran Pulau Beralo. Mayat yang sudah meninggal tersebut mengeluarkan aroma yang tengik (bau), sehingga bau busuk dari mayat korban peperangan penjajahan mengganggu penciuman dari masyarakat setempat.

Selang waktu berlalu, waktu berganti tahunpun juga berganti bau busuk yang dikeluarkan oleh tumpukkan mayat peperangan menimbulkan tanda tanya besar dalam benak masyarakat yang tinggal disekitaran sungai kuantan. Dengan kejadian itu, masyarakat berinisiatif untuk mencari serta menelusuri sumber dari bau busuk yang telah mereka hidup dengan waktu yang cukup lama tersebut. Maka, setelah penelusuran dilakukan rupanya diketahuilah bahwa ditemukannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumpukkan mayat yang telah membusuh berbau bangkai busuk (tengik). Maka dari itulah masyarakat setempat sepakat menamaik Desa itu Sebagai Desa Pulau Beralo yang terdapat di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4.2 Kondisi Geografis Desa

Desa Pulau Beralo merupakan salah satu Desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pulau Beralo memiliki luas wilayah sekitar 13 Km<sup>2</sup>. Mengenai jarak tempuh dari Desa Pulau Beralo ke Pusat Kota Teluk Kuantan yaitu sekitar 30 KM. Jika menggunakan kendaraan sepeda motor jarak tempuhnya lebih kurang 1 jam, dan kalau menggunakan kendaraan roda empat mungkin sekitar 1 jam 10 menit. Mengenai jalan yang dilalui yang ada di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun batas-batas wilayah Desa Simpang Pulau Beralo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Kuantan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberang Pulau Busuk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sorik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Kulur

#### 4.3 Demografi Desa

Demografi berasal dari kata “*Demos dan Grafein*” yang artinya penduduk dan catatan, bahasan tentang sesuatu. Jadi, secara etimology makna demografi itu sendiri adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Demografi juga mempelajari jumlah persebaran wilayah, dan komposisi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk dan mobilitas sosial. Pada pembahasan mengenai demografi ini, penulis menjelaskan beberapa kategori seperti : jumlah penduduk, agama penduduk, etnis penduduk, mata pencaharian penduduk dan lainnya.

#### 4.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Pulau Beralo sekitar 1.743 jiwa tergabung dalam 484 Kepala Keluarga. Para penduduk asli yang tinggal di Desa Pulau Beralo memiliki berbagai ragam suku, seperti: melayu (besar, tigo nini, kecil) caniago, paliang sony, muaro ili, padaghek, paghambai, dan sebagainya, namun yang paling banyak itu memang berasal dari suku Melayu.

Masyarakat Desa Pulau Beralo, adat istiadat serta tradisi dan kebiasaan memang masih kental disana. Keberagaman masih terlihat dan bisa dirasakan dengan jelas, solidaritasnya kuat, kerjasama serta gotong royong masih terasa. Jiwa individual masyarakat disana tidak begitu menonjol dan serta hanya bisa dibilang minim sekali, karena masyarakat disana sadar akan adanya ketergantungan serta saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Karena memang pada dasarnya makhluk itu terlahir sebagai makhluk sosial. Maka dari itulah setiap individu saling tolong menolong dalam kesusahan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	889	51,01
2	Perempuan	854	48,99
<b>Jumlah</b>		<b>1.743</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017*

Dari tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sebesar 48,99%, sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 51,01%. Perbandingannya memang tidak begitu jauh. Intinya semua masyarakat memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4.3.2 Agama Penduduk

Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama juga merupakan hak masing-masing orang untuk menganutnya, dan agama itu juga merupakan identitas dan pedoman dalam menjalankan kehidupan umat manusia.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.743	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.743</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa masyarakat Desa Pulau Beralo 100%, masyarakatnya beragama islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.3 Suku Penduduk

Suku merupakan suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.

Suku merupakan sesuatu yang hampir dimiliki oleh setiap orang, biasanya ada yang dituruni dari suku Bapak, ada juga yang dituruni oleh piha Ibu. Garis keturunan ini diwarisi melalui lingkungan budaya, kebiasaan yang berlaku dalam sebuah komunitas masyarakat. Selain itu, keberagaman suku juga menunjukkan adanya keragaman budaya yang berbaur didalam lingkup masyarakat Simpang Pulau Beralo.

Masyarakat di Desa Pulau Beralo sistem keturunan berdaraskan sistem kekerabatan *Matrilineal*, yaitu dari berdasarkan garis keturunan ibu. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	600	34,42
2	Caniago	320	18,25
3	Piliang	360	20,65
4	Muaro ili	143	8,21
5	Padaghek	130	7,46
6	Paghambai	190	10,91
<b>Jumlah</b>		<b>1.743</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017*

Dari tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa mayoritas suku dari masyarakat di Desa Pulau Beralo yaitu suku Melayu sebanyak 34,42%,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Caniago sebanyak 18,25%, Piliang 20,65%, Muaro ili 8,21%, Padaghek 7,46% dan Paghambai sebesar 10,91%.

#### 4.3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan ini merupakan salah satu cara yang bisa diperoleh oleh seseorang untuk mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pendidikan merupakan modal dalam hidup dan merupakan investasi jangka panjang untuk masa yang akan datang. Melalui pendidikan ini juga derajat seseorang yang awalnya biasa-biasa saja, namun setelah pendidikan tinggi diperoleh oleh seseorang tersebut bisa menaikkan derajat dirinya beserta keluarga besarnya. Perhatikan tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	44	10,35
2.	Buta Huruf	47	11,06
3.	Tamat SD	213	50,12
4.	Tamat SMP	35	8,23
5.	Tamat SMA	66	15,53
6.	Tamat Perguruan Tinggi	20	4,71
<b>Jumlah</b>		<b>425</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bisa sama-sama kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Beralo bisa dibilang sudah cukup bagus. Karena pada dasarnya masyarakat mayoritas sudah pernah mengenyam pendidikan walaupun cuma sampai sekolah dasar. Masyarakat yang buta huruf ada tapi tidak banyak cuma 11,06%, belum sekolah sebesar 10,35%, tamat Sekolah Dasar 50,12%, tamat SMP 8,23%, tamat SMA 15,53 dan tamatan perguruan tinggi sebesar 4,71%. Pendidikan di Desa Pulau Beralo lumayan mengalami peningkatan.

#### 4.3.5 Mata Pencaharian Penduduk

Memenuhi kebutuhan hidup setiap orang harus mempunyai pekerjaan pokok, karena pekerjaan merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan keluarga tetapi juga mempengaruhi status sosial seseorang. Namun, dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Beralo, masalah status tersebut bukanlah sesuatu yang harus di tonjolkan, karena memang bisa dibilang masyarakat disana itu mayoritas kehidupannya sederhana sekali.

Mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa pekerjaan kita akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan hidup. Mata pencaharian berarti pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya.

Adapun mata pencaharian pokok pada masyarakat Desa Pulau Beralo yaitu petani karet dan sawit. Mayoritas bekerja sebagai petani karet, walaupun harga karet merosot turunn, namun masyarakat tetap menyadap karet tanpa perduli hujan panas. Karena memang masyarakat bertumpuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hasil kebun karet. Selain petani karet, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pembang emas di sungai batang kuantan. Hasil yang tidak menentu tidak bisa diandalkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah tabel dibawah ini!.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Desa Pulau Beralo Berdasarkan**  
**Jenis Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	210	47,84
2.	Nelayan	20	4,56
3.	PNS	2	0,45
4.	Guru	17	3,87
5.	Peternak	165	37,59
6.	Wiraswasta	25	5,69
<b>Jumlah</b>		<b>439</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sebesar 47,84%, terbesar kedua yaitu peternak sebesar 37,59%, wiraswasta sebesar 5,69, nelayan 4,56%, guru 3,87% dan pegawai negeri sipil sebesar 0,45%. Mata pencaharian pada masyarakat Desa Pulau Beralo bervariasi, apapun jenis pekerjaannya intinya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### 4.4 Kondisi Sosial

Kondisi sosial merupakan keadaan, kedudukan atau posisi seseorang didalam masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dalam masyarakat. Kondisi sosial yang dimaksud pada bagian ini merupakan suatu keadaan dimana tergambar jelas mengenai kondisi masyarakat seperti: sarana pendidikan, sarana ibadah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehatan, lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

#### 4.4.1 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan seluruh perangkat alat, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Dalam hal ini dipandang dari segi bangunan pendidikan yang terdapat di Desa Pulau Beralo.

Pendidikan merupakan Sumber Daya Manusia yang paling utama dalam masyarakat. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan sistem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Peningkatan mutu tidak dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar akan tetapi bagaimana menciptakan sekolah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Berdasarkan Sarana Pendidikan**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	1
4.	SMP	1
<b>Jumlah</b>		<b>4 Unit</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Sipan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka sarana sekolah yang ada di Desa Pulau Beralo sebanyak 4 unit yaitu sekolah PAUD 1 unit, TK 1 unit, SD 1 unit, SMP 1 unit.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.1.2 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang dimaksud meliputi balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana kesehatan lainnya. Upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan dalam masyarakat.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka mengkaitkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah itu sendiri. Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti puskesmas dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan**

No	Jenis Saranan Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1 Unit</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017**

Tabel 4.7 diatas menggambarkan mengenai sarana kesehatan yang terdapat di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Sarana kesehatan yang terdapat di Pulau Beralo hanya Posyandu 1 unit, sarana ini digunakan untuk menampung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Sarana Ibadah

Sarana ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh setiap orang untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Karena masyarakat mayoritas muslim, maka sarana ibadah yang digunakan berbau religius.

Sarana ibadah adalah kebutuhan rohani manusia untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta. Selain itu, tempat beribadah bagi seluruh umat di dunia baik muslim maupun non muslim. Dengan adanya tempat ibadah adalah suatu bentuk toleransi dalam umat beragama terhadap kepercayaan masing-masing umat. Berdasarkan data monografi Desa Pulau Beralo bahwa sarana ibadah yang dimiliki oleh Desa Pulau Beralo sudah cukup bagus dan berjumlah cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Sarana Ibadah**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushollah	8
<b>Jumlah</b>		<b>10 Unit</b>

**Sumber: Kantor Kepala Desa Beralo Sipan 2017**

Berdasarkan tabel 4.8 di atas sarana ibadah terdiri 10 unit, di antaranya yaitu: masjid sebanyak 2 unit dan mushollah sebanyak 8 unit. Sarana ibadah digunakan untuk beribadah dengan baik oleh masyarakat setempat.

### 4.5 Kondisi Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintahan yang dimaksud disini merupakan kondisi dimana tergambar secara umum mengenai pemerintahan yang ada di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini, kondisi pemeritahan desa bisa dilihat dari lembaga pemerintahan desa itu sendiri, berfungsi atau tidak tergantung kepada pemerintah desa yang ada serta masyarakat setempat. Setiap orang memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

### 4.5.1 Lembaga Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kondisi pemerintahan desa merupakan keadaan dimana keadaan pemerintahan desa tergambar jelas, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah pada suatu desa tertentu. Kemanjuaan pembangunan suatu desa ditentukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang ada. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Berdasarkan Lembaga Pemerintahan Desa**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	6
4	BPD	6
	Jumlah	14

**Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, tergambar jelas bahwa pemerintah desa yang terdapat di Desa Sako terdiri dari 14 orang yang secara keseluruhan terbagi ke dalam kategorinya masing-masing seperti : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Perangkat Desa 6 orang dan BPD 6 orang. Pemerintah Desa



memiliki tugasnya masing-masing terutama dalam bidang pembangunan Desa Pulau Beralo guna lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Tabel diatas juga menggambarkan struktur pemerintahan desa yang terdapat dimasyarakat.

#### 4.5.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII Pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Lembaga Kemsyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikit serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah atau tembat bagi masyarakat menyalurkan kemampuan yang ia miliki. Lembaga inilah yang akan menyalurkan bakat dan minat tersebut. Dengan adanya lembaga kemsyarakat ini masyarakat akan lebih mudah serta kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tertata dengan baik. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Lembaga Kemasyarakatan**

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	LPM	1
2.	PKK	1
3.	Pengajian	5
4.	Arisan	6
5.	Kelompok Tani	5
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Beralo Tahun 2017**

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa Pulau Beralo yaitu sejumlah 18 unit. Semua lembaga yang ada memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga terorganisir dengan baik sesuai dengan tujuan lembaga itu sendiri. Berjalan atau tidaknya tergantung kepada anggota lembaga tersebut, makanya diperlukan sekali kekompakkan antar anggotanya.

#### **4.6 Visi dan Misi Desa Pulau Beralo**

##### **4.6.1 Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pulau Beralo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pulau Beralo seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Pulau Beralo adalah :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MASYARAKAT MAKMUR SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN YANG MAJU, AMAN DAN AGAMIS”

### 4.6.2 Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pulau Beralo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pulau Beralo adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
2. Pengembangan agribisnis berbasis kelompok
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat
5. Pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan sarana dan prasarana agama

Visi dan misi setiap desa juga merupakan sesuatu hal penting yang harus ditentukan oleh Kepala Desa dan pemerintahan desa lainnya. Karena dengan adanya visi dan misi itulah bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Beralo baik pembangunan fisik, sosial, ekonomi serta pembangunan lainnya. Pembangunan Desa juga butuh dukungan dari semua kalangan masyarakat agar desa menjadi lebih berkembang dan maju kedepannya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Maka, pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa Pulau Beralo agar lebih baik kedepannya.

#### 6.1 Kesimpulan

1. Pendapatan yang diperoleh oleh Desa Pulau Beralo bersumber dari PAD, APBN, Bantuan Keuangan, Pendapatan Transfer serta Pendapatan lain-lain yang bersumber dari dana hibah dari pihak ke-3 tanpa ada pihak yang merasa terikat antara satu dengan yang lainnya.
2. Pendapatan Desa diatas akan digunakan untuk keperluan (belanja) di Desa Pulau Beralo, semua kebutuhan akan dipenuhi oleh pendapatan yang telah ada.
3. Pembiayaan pada pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

#### 6.2 Saran

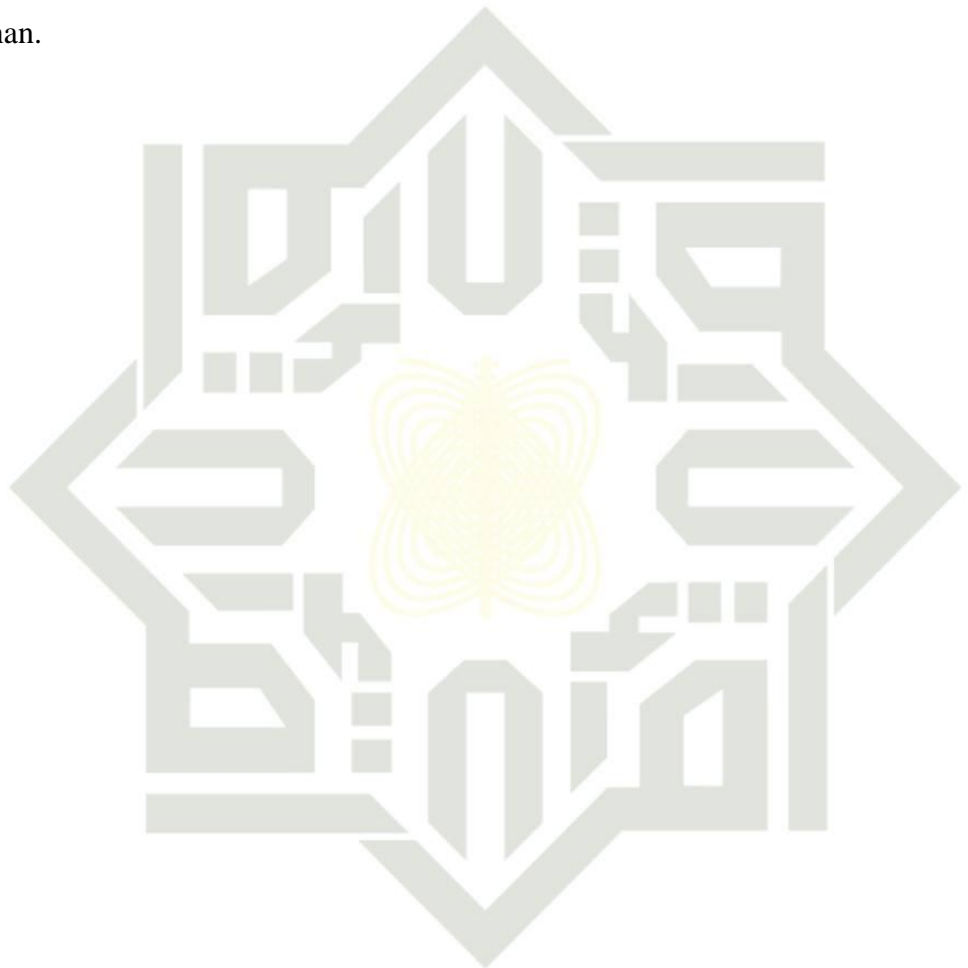
1. Pemerintahan Desa. Diharapkan menjalankan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa harus dilakukan secara transparansi serta sesuai dengan kebutuhan desa. Karena memang tujuan

pemerintahan desa membangun masyarakat secara bersama fisik maupun non fisik.

2. Bagi Masyarakat. Diharapkan berpartisipasi dalam membangun desa bersama. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 74
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Persada
- Halim. 2008. *Pendapatan Asli Desa*. Jakarta : Persada
- Jafar, Marwan. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa
- Mahsun. 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Manila, I. GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Nurcholis. 2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Sutrisno. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Jatinagor : Gramedia.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa

## PEDOMAN WAWANCARA

No.	INDIKATOR PENELITIAN	DAFTAR PERTANYAAN
	Pendapatan	
1	a. Hasil Usaha	1. Bagaimana hasil usaha yang terdapat di Desa Pulau Beralo?. 2. Apakah mempengaruhi pendapatan Desa tersebut?. 3. Masyarakat dilibatkan atau tidak?
	b. Hasil Aset	1. Apa sajakah hasil aset yang terdapat di Desa Pulau Beralo?. 2. Aset yang ada apakah dikelola dengan baik?. 3. Bagaimana sistem yang digunakan?
2	Belanja	
	a. Belanja terduga	1. Bagaimana pendapat anda mengenai belanja terduga desa pulau beralo?. 2. Apakah semua belanja sesuai dengan wacana sebelumnya?. 3. Ada atau tidak alternatif untuk menekan besarnya belanja?
	b. Belanja tak terduga	1. Bagaimana mengatasi belanja tak terduga jika pendapatan tidak memadai?. 2. Apakah akan tetap dipenuhi?
3	Pembiayaan	
	a. Pembangunan fisik dan non fisik	1. Bagaimana pembangunan yang terdapat di Desa Pulau Beralo?. 2. Apakah terealisasi dengan baik?
	b. Bantuan sosial	1. Apa saja jenis bantuan sosial yang diberikan?. 2. Apakah masyarakat mendapatkan bagian secara merata?
	c. Pemberdayaan Masyarakat	1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat?. 2. Apakah masyarakat antusias?. 3. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PULAU BERALO**

☉ TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>0</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>00</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>109,043.00</b>	<b>890,957.00</b>
000	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,000,000.00	109,043.00	890,957.00
<b>00</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,158,051,000.00</b>	<b>1,158,051,800.00</b>	<b>800.00</b>
000	Dana Desa	744,563,000.00	744,563,000.00	0.00
000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19,466,000.00	15,572,800.00	3,893,200.00
000	Alokasi Dana Desa	394,022,000.00	397,916,000.00	3,894,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,159,051,000.00</b>	<b>1,158,160,843.00</b>	<b>890,157.00</b>
<b>0</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>21</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b><u>276,773,109.00</u></b>	<b><u>253,077,200.00</u></b>	<b><u>23,695,909.00</u></b>
<b>210</b>	<b>Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD</b>	<b>168,180,000.00</b>	<b>168,180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>168,180,000.00</b>	<b>168,180,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,021	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
00,021	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,840,000.00	21,840,000.00	0.00
00,021	Tunjangan BPD dan Anggotanya	41,340,000.00	41,340,000.00	0.00
<b>212</b>	<b>Kegiatan Operasional Perkantoran</b>	<b>52,558,109.00</b>	<b>48,862,200.00</b>	<b>3,695,909.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22,358,109.00</b>	<b>20,066,500.00</b>	<b>2,291,609.00</b>
00,021	Belanja Alat Tulis Kantor	4,690,000.00	4,540,000.00	150,000.00
00,021	Belanja Benda Pos dan Materai	1,386,000.00	840,000.00	546,000.00
00,021	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	604,000.00	500,000.00	104,000.00
00,021	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
000,212	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00
000,212	Belanja Honorarium Tim Panitia	500,000.00	500,000.00	0.00
000,212	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
000,212	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KODE REK

URAIAN

1

2

00,021

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

000,213

Belanja Perjalanan Dinas

210

Kegiatan Operasional RT/RW

0,002

Belanja Barang dan Jasa

000,214

Belanja Honorarium Tim Panitia

216

Kegiatan Pendataan Desa

0,002

Belanja Barang dan Jasa

00,022

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

00,022

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

000,216

Belanja Honorarium Tim Panitia

2,110

Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

00,021

Belanja Modal

0,002,110

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

2,113

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKPDesa

00,021

Belanja Barang dan Jasa

000,211

Belanja Alat Tulis Kantor

000,211

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

000,211

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0,002,113

Belanja Honorarium Tim Panitia

1,558,109.00

66,500.00

1,491,609.00

30,200,000.00

28,795,700.00

1,404,300.00

200,000.00

0.00

200,000.00

30,000,000.00

28,795,700.00

1,204,300.00

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

3,410,000.00

3,410,000.00

0.00

810,000.00

810,000.00

0.00

1,080,000.00

1,080,000.00

0.00

1

Realisasi s.d 31/12/2017

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

( Rp )

( Rp )

3

4

5

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

4,500,000.00

4,500,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

2,100,000.00

2,100,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00

6,035,000.00

6,035,000.00

0.00

6,035,000.00

6,035,000.00

0.00

715,000.00

715,000.00

0.00

295,000.00

295,000.00

0.00

2,175,000.00

2,175,000.00

0.00

2,850,000.00

2,850,000.00

0.00



2,114	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
00,021	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
000,211	Belanja Alat Tulis Kantor	436,000.00	436,000.00	0.00
000,211	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	934,000.00	934,000.00	0.00
000,211	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880,000.00	880,000.00	0.00
0,002,114	Belanja Honorarium Tim Panitia	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
2,119	Kegiatan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
00,021	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
000,212	Belanja Alat Tulis Kantor	545,000.00	545,000.00	0.00
000,212	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00
000,212	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
00,021	<b>Belanja Modal</b>	900,000.00	900,000.00	0.00
0,002,119	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900,000.00	900,000.00	0.00
22	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	538,453,000.00	537,389,725.00	1,063,275.00
223	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30,135,200.00	30,028,000.00	107,200.00
0,002	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7,990,000.00	7,990,000.00	0.00
00,022	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000.00	50,000.00	0.00
00,022	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	145,000.00	145,000.00	0.00
00,022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440,000.00	440,000.00	0.00
000,223	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6,555,000.00	6,555,000.00	0.00

13/03/2019 10:41:59 PM

2

		Realisasi s.d 31/12/2017		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	( Rp )	( Rp )	( Rp )
		3	4	5
000,223	Belanja Honorarium Tim Panitia	800,000.00	800,000.00	0.00
0,002	<b>Belanja Modal</b>	22,145,200.00	22,038,000.00	107,200.00
000,223	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,145,200.00	22,038,000.00	107,200.00
2,218	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK Desa	508,317,800.00	507,361,725.00	956,075.00
00,022	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109,305,400.00	109,305,400.00	0.00
000,222	Belanja Alat Tulis Kantor	260,000.00	260,000.00	0.00
000,222	Belanja Benda Pos dan Materai	390,000.00	390,000.00	0.00
000,222	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	240,400.00	240,400.00	0.00

- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penulisan buku, dan sebagainya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Printed by Siskindes



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan cetakan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

000,222	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660,000.00	660,000.00	0.00
0,002,218	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	95,305,000.00	95,305,000.00	0.00
0,002,218	Belanja Honorarium Tim Panitia	12,350,000.00	12,350,000.00	0.00
0,002,218	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>00,022</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>399,012,400.00</b>	<b>398,056,325.00</b>	<b>956,075.00</b>
0,002,218	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	399,012,400.00	398,056,325.00	956,075.00
<b>23</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>103,273,000.00</b>	<b>103,164,450.00</b>	<b>108,550.00</b>
<b>231</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000.00	50,000.00	0.00
00,023	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00
00,023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660,000.00	660,000.00	0.00
000,231	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200,000.00	200,000.00	0.00
<b>232</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000.00	100,000.00	0.00
00,023	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	220,000.00	220,000.00	0.00
00,023	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880,000.00	880,000.00	0.00
00,023	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
000,232	Belanja Perjalanan Dinas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
000,232	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500,000.00	500,000.00	0.00
<b>233</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	Belanja Alat Tulis Kantor	50,000.00	50,000.00	0.00
00,023	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00
00,023	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
000,233	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>234</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pemuda/Remaja</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
000,234	Belanja Perjalanan Dinas	200,000.00	200,000.00	0.00





KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
235	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional PAUD/TK/RA Desa</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
0,002	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,024	Belanja Alat Tulis Kantor	780,000.00	780,000.00	0.00
00,024	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	220,000.00	220,000.00	0.00
000,235	Belanja Honorarium Tim Panitia	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
000,235	Belanja Perjalanan Dinas	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
236	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional PDTA/TPA</b>	<b>22,240,000.00</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
0,002	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22,240,000.00</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
00,024	Belanja Alat Tulis Kantor	628,000.00	588,000.00	40,000.00
00,024	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	372,000.00	372,000.00	0.00
00,024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00
000,236	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
000,236	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
237	<b>Kegiatan Pembinaan dan Operasional Masjid</b>	<b>26,400,000.00</b>	<b>26,400,000.00</b>	<b>0.00</b>
0,002	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>26,400,000.00</b>	<b>26,400,000.00</b>	<b>0.00</b>
000,237	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
238	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
0,002	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
000,239	Belanja Honorarium Tim Panitia	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2,313	<b>Kegiatan Pembinaan Keagamaan</b>	<b>24,892,000.00</b>	<b>24,823,450.00</b>	<b>68,550.00</b>
00,023	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24,892,000.00</b>	<b>24,823,450.00</b>	<b>68,550.00</b>
000,231	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24,892,000.00	24,823,450.00	68,550.00
2,315	<b>Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan</b>	<b>4,941,000.00</b>	<b>4,941,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4,941,000.00</b>	<b>4,941,000.00</b>	<b>0.00</b>
000,232	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4,441,000.00	4,441,000.00	0.00
0,002,315	Belanja Perjalanan Dinas	500,000.00	500,000.00	0.00
2,316	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
00,023	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
0,002,316	Belanja Honorarium Tim Panitia	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
24	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>242,110,000.00</b>	<b>224,853,750.00</b>	<b>17,256,250.00</b>
240	<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



0,002

**Belanja Barang dan Jasa**

00,024

Belanja Alat Tulis Kantor

00,024

Belanja Benda Pos dan Materai

00,024

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

00,024

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

00,024

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

000,242

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

000,242

Belanja Honorarium Tim Panitia

13/03/2019 10:41:59 PM

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

105,000.00

105,000.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00

143,000.00

143,000.00

0.00

660,000.00

660,000.00

0.00

192,000.00

192,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

4

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

( Rp )

( Rp )

1

2

3

4

5

000,242

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

000,242

Belanja Perjalanan Dinas

24,200,000.00

24,200,000.00

0.00

000,242

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

50,000.00

50,000.00

0.00

000,242

Belanja Sewa Ruangan atau Gedung

500,000.00

500,000.00

0.00

243

**Kegiatan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa**

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0,002

**Belanja Barang dan Jasa**

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

000,243

Belanja Honorarium Tim Panitia

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

000,243

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

1,050,000.00

1,050,000.00

0.00

000,243

Belanja Perjalanan Dinas

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

000,243

Belanja Sewa Ruangan atau Gedung

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00

245

**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0,002

**Belanja Barang dan Jasa**

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

00,025

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

00,025

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

000,245

Belanja Honorarium Tim Panitia

9,900,000.00

9,900,000.00

0.00

246

**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan**

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0,002

**Belanja Barang dan Jasa**

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

000,246

Belanja Honorarium Tim Panitia

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

000,246

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

700,000.00

700,000.00

0.00

000,246

Belanja Perjalanan Dinas

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

Hak Cipta Diilanggi Undang-Undang  
1. Diilanggi me  
a. Pengutipan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diilanggi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

UIN Suska Riau

State Islamic Univ



000,246	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
<b>247</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani</b>	<b>186,110,000.00</b>	<b>168,853,750.00</b>	<b>17,256,250.00</b>
<b>0,002</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19,610,000.00</b>	<b>19,610,000.00</b>	<b>0.00</b>
000,025	Belanja Alat Tulis Kantor	105,000.00	105,000.00	0.00
000,025	Belanja Benda Pos dan Materai	150,000.00	150,000.00	0.00
000,025	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00
000,025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770,000.00	770,000.00	0.00
000,025	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	610,000.00	610,000.00	0.00
000,247	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	300,000.00	300,000.00	0.00
000,247	Belanja Sewa Peralatan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
000,247	Belanja Honorarium Tim Panitia	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
000,247	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
000,247	Belanja Perjalanan Dinas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
000,247	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	50,000.00	50,000.00	0.00
000,247	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
<b>0,002</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>166,500,000.00</b>	<b>149,243,750.00</b>	<b>17,256,250.00</b>
000,247	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	166,500,000.00	149,243,750.00	17,256,250.00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,160,609,109.00</b>	<b>1,118,485,125.00</b>	<b>42,123,984.00</b>

**JUMLAH BELANJA**

13/03/2019 10:42:00 PM

5

		Realisasi s.d 31/12/2017		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
		( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	2	3	4	5
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-1,558,109.00</b>	<b>39,675,718.00</b>	<b>-41,233,827.00</b>
<b>0</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>00</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1,558,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,558,109.00</b>
<b>000</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,558,109.00	0.00	1,558,109.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>1,558,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,558,109.00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>	<b>39,675,718.00</b>	<b>-39,675,718.00</b>

Teluk Kuantan, 13 March 2019

Kepala Desa

ALFIKRI HARMAL DANI, SKM

13/03/2019 10:42:00 PM

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang bersifat akademik b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Printed by Siskudus

Printed by Siskudus



# AMPRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islan

n Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Gambar 1.1**



**Wawancara bersama Kepala Desa Pulau Beralo**

**Gambar 1.2**



**Acara Rapat Perangkat Desa**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.3**



**Jalan Desa yang telah rusak**

**Gambar 1.4**



**Jalan Desa yang rusak**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.5**



**Kompang sebagai alat transportasi penyeberangan Desa**

**Gambar 1.6**



**Wawancara bersama tokoh masyarakat**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.7**



**Proses Pembangunan**

**Gambar 1.8**



**Wawancara bersama Perangkat Desa**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1.9**



### Proses Pembangunan Jamban Masyarakat

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/365/2019  
Sifat : Biasa  
Campiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 07 Januari 2019 M  
29 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada  
Yth. **Muamar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Yoga Andrika Tama Candra  
NIM : 11375106351  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XI (Sebelas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/366/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 07 Januari 2019 M  
29 Rabiul Akhir 1440 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau

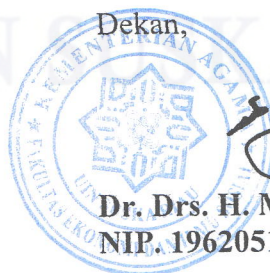
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yoga Andrika Tama Candra  
NIM. : 11375106351  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XI (Sebelas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau  
Baralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi"**  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KANTOR DESA PULAU BERALO

Jalan Jendral Sudirman Desa Pulau Beralo Kode Pos 29561

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 0/SK/ PBL/ V/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIKRI HARMAL DANI, SKM  
Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang tercantum dibawah ini benar telah melakukan penelitian di Kantor Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bahan untuk menyusun Tugas Akhir (Skripsi) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nama : YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA  
NIM : 11375106351  
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO  
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya,

Pulau Beralo, 08 Mei 2019

KEPALA DESA  
  
ALFIKRI HARMAL DANI, SKM







# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/2019/75

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/18852 Tanggal 18 FEBRUARI 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	<b>YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA</b>
NIM	:	11375106351
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
	:	FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	<b>KANTOR DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 21 Februari 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18852  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/366/2019 Tanggal 7 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YOGA ANDRIKA TAMA CANDRA**
2. NIM / KTP : **11375106351**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. PAHLAWAN KERJA**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR DESA PULAU BERALO KEC. KUANTAN HILIR SEBERANG**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Februari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP

**Yoga Andrika Tama Candra** merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Khaidir dan Eni Darlis yang lahir di Pulau Kulur tanggal 23 Januari 1995. Pada tahun 2007 telah menyelesaikan pendidikan di SDN 020 Pulau Kulur, pada tahun 2010 telah menyelesaikan pendidikan SMPN 1 Kuantan Hilir. Kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan SMAN 1 Inuman, dan penulis juga pernah menjabat jadi Ketua Osis tahun 2011-2013. Melalui Ujian Masuk Jalur Mandiri (UMJM) pada tahun 2013 diterima sebagai mahasiswa di jurusan Administrasi Negara Fekonso Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama masa studi di jurusan Administrasi Negara Fekonso Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, penulis aktif dalam kegiatan olahraga, diantaranya penulis pernah mengikuti sepak bola dalam kejuaran Rektor Cup pada tahun 2014. Pada tanggal 18 Januari 2016 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial penulis menyelesaikan Studi Strata Satu dengan skripsi “ *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi* “ dan dinyatakan lulus ujian skripsi dengan predikat yang memuaskan pada tanggal 27 September 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.